

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang telah digulirkan sejak tahun 2001 memotivasi daerah untuk berusaha mencukupi kebutuhan daerahnya tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Sejalan dengan hal itu pemerintah daerah mulai memiliki kewenangan khusus dalam mengatur rumah tangganya secara mandiri, termasuk pelaksanaan pemerintahan, pengambilan keputusan tentang pembangunan serta penggalian potensi dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Untuk menuju kemandirian sebagai daerah otonom tersebut, pemerintah daerah harus mampu menggali semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap awal, pemerintah kabupaten atau kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Ketiga pilar tersebut harus diramu sedemikian rupa sehingga sumber daya manusia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan teknologi yang dimilikinya. Pada fase berikutnya daerah dapat mengembangkan potensi tersebut menjadi berbagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah (*value added*) dan berdaya saing tinggi.

Salah satu potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan adalah sumber daya air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan oleh manusia sepanjang masa dan menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusiawi yang

sangat penting (Kodoatie, 2002). Air juga sangat diperlukan dalam pembangunan hampir di semua sektor, dari sektor pertanian dan perikanan, sarana dan prasarana, lingkungan sampai dengan pariwisata. Air dapat berguna sebagai air baku untuk air minum, air untuk irigasi, air untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci, air untuk kebutuhan industri maupun air yang digunakan untuk keperluan lain seperti pemancingan dan kolam. Keberlanjutan sumber daya air ini perlu dijaga mengingat manfaatnya yang sangat penting dalam kehidupan dan pembangunan.

Indonesia merupakan negara agraris dan pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. UU No.7 tahun 1996 tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat (Partowijoto, 2003). Ketahanan pangan diartikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutunya, aman dan merata, serta terjangkau.

Berbagai cara telah dilakukan dalam rangka pembangunan di bidang pertanian untuk dapat meningkatkan produksi pangan antara lain dengan ekstensifikasi yaitu usaha peningkatan produksi pangan dengan meluaskan areal tanam, dan intensifikasi yaitu usaha peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan penggunaan bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.

Pembangunan saluran irigasi untuk menunjang penyediaan bahan pangan nasional sangat diperlukan, sehingga ketersediaan air di lahan akan terpenuhi walaupun lahan tersebut berada jauh dari sumber air permukaan (sungai). Hal tersebut tidak terlepas dari usaha teknik irigasi yaitu memberikan air dengan kondisi tepat mutu, tepat ruang dan tepat waktu dengan cara yang efektif dan ekonomis (Sudjarwadi, 1990). Kontribusi prasarana dan sarana irigasi terhadap ketahanan pangan selama ini cukup besar yaitu sebanyak 84 persen produksi beras nasional bersumber dari daerah irigasi (Hasan, 2005).

Perlunya alokasi sumberdaya air (irigasi) pada lahan sawah terkait dengan kinerja pengelolaan air irigasi pada level usahatani yang masih jauh dari optimal, bahkan cenderung masih boros, sementara itu kehilangan air yang terjadi di saluran irigasi juga sulit di tekan. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama rendahnya realisasi areal tanam dan panen padi pada musim tanam pertama dan terlebih pada musim tanam kedua, yang bermuara pada rendahnya perolehan produksi (Fagi, 2002). Dari hasil penelitian Saptana *dkk* (2001) terungkap bahwa salah satu simpul kritis dalam pengelolaan air irigasi mencakup 8 aspek, salah satunya adalah sistem jaringan irigasi.

Keberadaan jaringan irigasi dalam hubungannya dengan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan khususnya padi sawah telah menjadi pembahasan berbagai pakar pertanian. Pentingnya jaringan irigasi ini ditunjukkan pula dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP), antara lain PP No 77/2001 yang diperbaharui dengan PP. No.20 /2006 Tentang Irigasi.

Irigasi bagi tanaman padi berfungsi sebagai penyedia air yang cukup dan stabil untuk menjamin produksi padi. Luas tanah atau sawah di dalam daerah pengairan di bagi – bagi sedemikian rupa sehingga memudahkan pembagian airnya. Adapun cara pembagiannya tergantung pada tujuan pengairan itu dan kebutuhan air untuk pertanian. Air yang di salurkan ke sawah melalui sistem jaringan yang terdiri atas saluran – saluran air dengan bangunan pengendali. Kapasitas irigasi dalam kaitannya dengan ketersediaan air untuk tanaman padi dapat dikaji melalui permasalahan irigasi, dan faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap pengelolaan air irigasi. Ketersediaan air irigasi untuk tanaman padi sawah banyak di pengaruhi oleh beberapa faktor kondisi tanah, jenis tanaman, iklim, topografi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Tanaman padi merupakan tanaman yang banyak membutuhkan air, khususnya pada saat tumbuh mereka harus selalu tergenangi air. Agar produktivitas padi dapat efektif dalam satu satuan luas lahan, maka dibutuhkan suplay air yang cukup melauai irigasi. Irigasi merupakan prasarana untuk meningkatkan produktifitas lahan dan meningkatkan intensitas panen per tahun. Tersedianya air irigasi yang cukup terkontrol merupakan input untuk meningkatkan produksi padi.

Mengingat begitu pentingnya irigasi maka kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan pengairan harus diikuti dengan perluasan jaringan irigasi. Pembangunan dan rehabilitas jaringan irigasi perlu ditingkatkan untuk memelihara tetap berfungsinya sumber air dan jaringan irigasi bagi pertanian. Dalam rangka usaha meningkatkan pembangunan di sektor pertanian untuk mencukupi kebutuhan

pangan khususnya beras, salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah menempatkan pembangunan di sektor irigasi.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan salah satu penyangga pangan di wilayah provinsi Sumatera Utara dengan luas baku sawah 20.259,5 Ha. Keseluruhan Daerah Irigasi yang ada berjumlah 144 buah, dengan luas areal total adalah 5.516,2 Ha. Di Kecamatan Tara Bintang sendiri terdapat 8 Daerah Irigasi dengan luas baku sawah 624 Ha dengan irigasi seluas 104 Ha. Dari delapan daerah irigasi di Kecamatan Tara Bintang, yang terluas adalah Daerah Irigasi Aek Riman dengan luas 113 Ha.

Pembangunan daerah irigasi merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam meningkatkan produksi padi. Produktivitas padi sawah di Kabupaten Humbang Hasundutan rata-rata sebesar 3,5 – 5 ton/ha/panen, masih lebih rendah dari potensi produksi varietas unggul sebesar 6 – 8 ton/ha. Daerah irigasi memungkinkan tersedianya air sepanjang tahun, sehingga pola tanam padi sawah dapat dilakukan 2 kali dalam setahun. Namun kenyataannya di sebagian besar daerah irigasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, termasuk di Kecamatan Tara Bintang, pola tanam padi sawah masih 1 kali dalam setahun. Dengan produktivitas padi yang masih rendah menunjukkan manfaat dari irigasi secara ekonomi masih rendah, hal ini selanjutnya akan mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

Pemanfaatan daerah irigasi yang belum maksimal selanjutnya akan mempengaruhi pengembangan wilayah di Kecamatan Tara Bintang, dimana sektor pertanian, khususnya sub sektor tanaman pangan (padi sawah) merupakan sumber

mata pencaharian utama masyarakat. Selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan ekonomi masyarakat, dimana perkembangan ekonomi masyarakat akan mempengaruhi ketersediaan ruang/wilayah. Perkembangan ini selanjutnya akan berdampak pada pemanfaatan daerah irigasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dilakukan pengkajian secara ilmiah terhadap pemanfaatan daerah irigasi Aek Riman dalam pengembangan wilayah di Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar manfaat pengembangan daerah irigasi Aek Riman terhadap peningkatan produksi padi sawah untuk pengembangan wilayah di Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bagaimana kelayakan pembangunan daerah irigasi Aek Riman dalam pengembangan wilayah di Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis seberapa besar manfaat pengembangan daerah irigasi Aek Riman terhadap peningkatan produksi padi sawah untuk pengembangan wilayah di Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk menganalisis kelayakan pembangunan daerah irigasi Aek Riman dalam pengembangan wilayah di Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Prasarana dan Wilayah (Praswil) Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam perencanaan daerah irigasi.
2. Sebagai metode alternatif dalam pengambilan keputusan strategis bagi birokrat maupun dunia pendidikan.